

MADANI Insight

Volume 2
Desember 2019

*“Gambaran Industri Sawit Indonesia,
Menjawab Asumsi dengan Fakta dan Angka”*



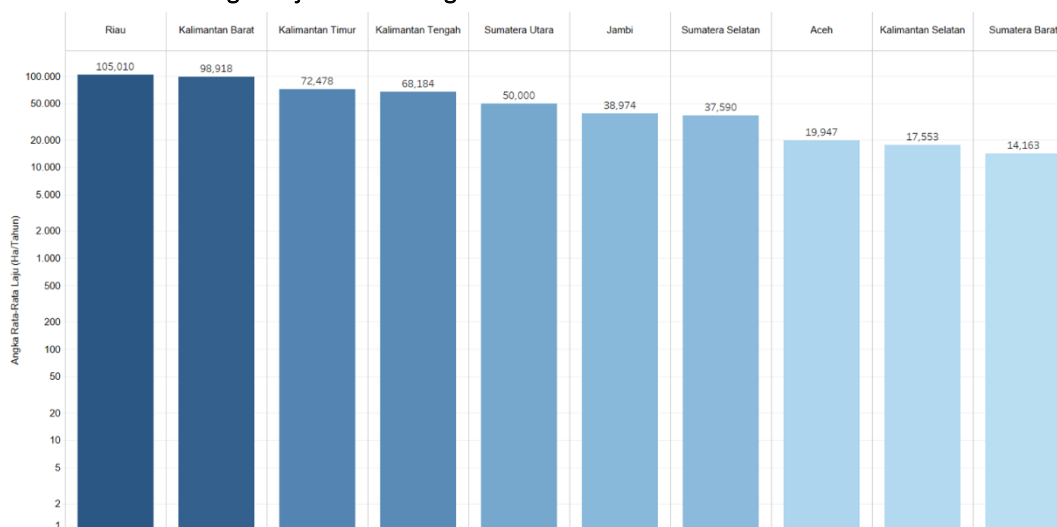
SOROTAN UTAMA

- **Pentingnya Diversifikasi Komoditas Demi Kesejahteraan Masyarakat Desa:**
Dari sepuluh provinsi dengan laju perkembangan lahan kelapa sawit terbesar, hanya tiga di antaranya yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang tinggi. Ke depan, perlu adanya pendekatan diversifikasi komoditas pada level desa dengan memperhatikan keseimbangan satu komoditas dengan komoditas lainnya.
- **Pembenahan Tata Kelola Menjadi Hal Mendasar Untuk Peningkatan Produktivitas Sawit:**
Meski menjadi produsen CPO terbesar di dunia, ditambah dengan laju luas kebun yang terbilang besar, nyatanya produktivitas sawit Indonesia masih jauh dari harapan. Ke depan, pembenahan tata kelola semestinya harus menjadi fokus semua pihak dalam mengurai permasalahan ini.

PENTINGNYA MENDORONG DIVERSIFIKASI KOMODITAS DEMI SEJAHTERANYA MASYARAKAT DESA

Laju perkembangan luas areal tanam sawit pada periode 2010-2018 menunjukkan 10 dari 23 provinsi tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan terbesar dari tahun ke tahun. Provinsi Riau menduduki peringkat pertama dengan penambahan areal tanam sawit seluas 105 ribu hektare (ha) per tahun, disusul dengan Kalimantan Barat dengan 98 ribu hektare per tahun, 8 provinsi lainnya secara berturut-turut menyusul dengan besarnya masing-masing (tabel 1). Tekanan permintaan pasar global dan kebutuhan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional mendorong terjadinya perkembangan areal tanam sawit secara masif di Indonesia¹. Di sisi lain, masifnya perkembangan luas sawit juga dipercaya menjadi bagian penting untuk pembangunan pedesaan dan menyejahterakan masyarakat yang hidup di daerah tersebut.² Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar ataupun salah, tergantung pada metode ataupun pada area mana yang ditinjau.

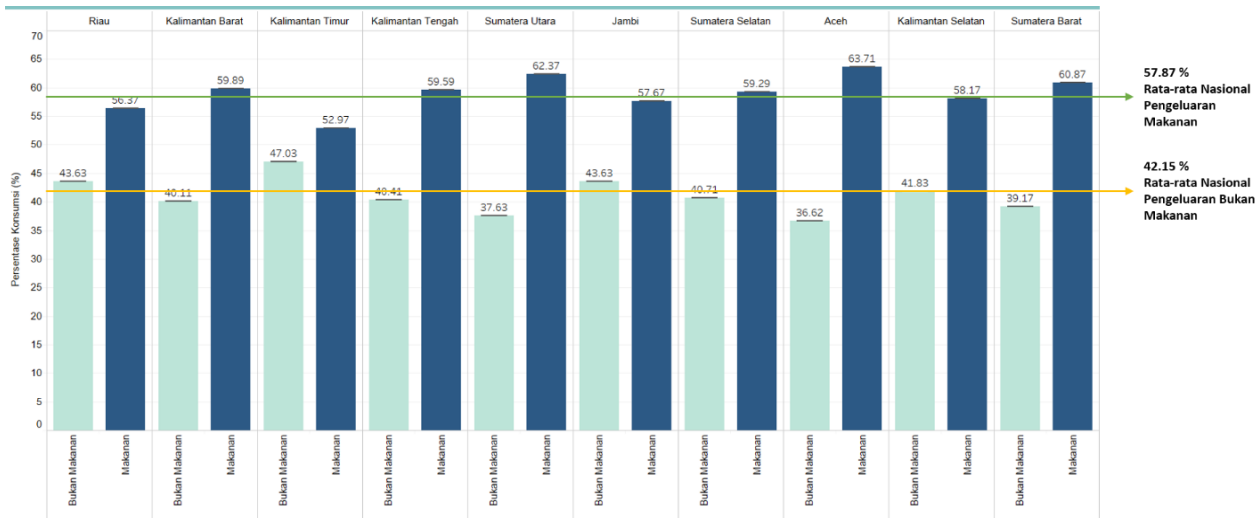
Grafik 1.10 Provinsi Dengan Laju Perkembangan Areal Tanam Sawit Terbesar Periode 2010-2018



Sumber: Statistik Perkebunan, Kementerian Pertanian, 2018

Anggapan bahwa sawit tidak mampu menyejahterakan dan justru menyengsarakan masyarakat desa bisa ditemukan dalam publikasi yang dikeluarkan kelompok masyarakat sipil. Seperti CIFOR pada tahun 2018 yang melakukan studi kasus di pedesaan Kalimantan Timur, hasilnya mengemukakan bahwa desa-desa di sekitar perkebunan sawit seolah sejahtera, namun sebenarnya rentan bahkan mengalami dilema nafkah rumah tangga pedesaan. Sebab, menurut publikasi tersebut, sejatinya desa perlahan namun pasti kehilangan keberagaman (diversitas) sumber nafkah akibat berubahnya ekosistem yang kini didominasi oleh komoditas monokultur sawit.³ Hasil yang tidak jauh berbeda didapatkan dari sebuah penelitian yang baru akan terbit milik *Institute for Economic, Social and Cultural Right*. Melalui pendekatan studi kasus komparasi kesejahteraan di 12 desa di Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Hasilnya, dari beberapa desa yang menanam kelapa sawit, penduduk desa memang memiliki pendapatan yang lebih tinggi, namun akses ke makanan, air, dan kesehatan lebih rendah dari desa yang tidak menanam komoditas tersebut.⁴ Namun, pandangan tersebut memberikan gambaran yang kasuistik yang berkisar pada wilayah penelitian yang menjadi area dari publikasi tersebut. Ketika melihat kembali kepada data makro secara nasional, hasilnya akan berbeda.

Presentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Daerah Perdesaan Menurut 10 Provinsi Dengan Laju Luas Sawit Terbesar 2010-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat desa adalah pola konsumsi rumah tangga (RT) di desa tersebut. Selama ini berkembang pengertian bahwa semakin besar proporsi pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan selama sebulan terhadap seluruh pengeluaran RT dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga.⁵ Berpegang pada pengertian tersebut, terdapat fakta bahwa hanya 3 dari 10 provinsi yang memiliki rata-rata konsumsi bukan makanan RT di atas rata-rata nasional dengan periode yang sama. Ketiga provinsi tersebut adalah Provinsi Riau, Kalimantan Timur dan Jambi, yang juga merupakan Provinsi yang memiliki luasan sawit signifikan secara nasional. Namun demikian, fakta lain menunjukkan tingginya rata-rata konsumsi bukan makanan di pedesaan 3 provinsi tersebut tidak saja didominasi oleh desa yang menanam sawit.

Riau misalnya, jumlah desa yang menanam sawit tercatat 829 desa (44%) dari total 1875 desa di provinsi tersebut⁶. Artinya, konsumsi bukan makanan yang berada di atas rata-rata nasional di provinsi ini juga dikontribusikan oleh komoditas perkebunan lainnya ($\pm 64\%$). Meskipun sawit merupakan komoditas utama di Riau terdapat dua komoditas perkebunan unggulan lainnya yakni karet dan kelapa, dua komoditas tersebut memproduksi hampir 400 ribu ton di tahun 2018.⁷

Kondisi serupa pun dapat terjadi di Kalimantan Timur dan Jambi. Jumlah desa yang menanam sawit di Kalimantan Timur tercatat 229 desa (27%) dari total 841 desa⁸, sementara Jambi tercatat 319 (23%) dari total 1399 desa⁹. Terdapat komoditas perkebunan utama selain sawit di Kalimantan Timur yakni karet dan kelapa dalam dengan kemampuan produksi 65 ribu dan 13 ribu ton di tahun 2017.¹⁰ Khusus di Kalimantan Timur kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dimana sawit ada di dalamnya hanya berada di peringkat empat, di bawah sektor Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan dan Konstruksi.¹¹ Sementara itu, Jambi memiliki komoditas perkebunan utama selain sawit berupa karet dan kayu manis dengan kemampuan produksi 300 ribu dan 65 ribu ton di tahun 2018.¹²

¹ Yulian Eka dkk., 2018. Dilema Nafkah Rumah Tangga Pedesaan Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur. Bogor. Center for International Forestry Research (CIFOR). Hlm.1

² Diakses melalui <https://gapki.id/news/4423/mitos-4-01-sawit-mengeksploitasi-sumber-daya-daerah-desa-pun-semakin-terbelakang> pada 27/11/2019

³ Yulian Eka dkk., 2018. Dilema Nafkah Rumah Tangga Pedesaan Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur. Bogor. Center for International Forestry Research (CIFOR). Hlm.15

⁴ Diakses melalui <https://theconversation.com/ini-mengapa-perkebunan-kelapa-sawit-bisa-membuat-masyarakat-desa-miskin-123382> pada 10/12/2019 pukul 02:57

⁵ Metode Mengukur Kesejahteraan. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Badan Pusat Statistik.2018.

⁶ Potensi Desa. Badan Pusat Statistik. 2018

⁷ Riau dalam Angka. Badan Pusat Statistik Riau. 2019

⁸ Potensi Desa. Badan Pusat Statistik. 2018

⁹ Ibid

¹⁰ Kalimantan Timur dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. 2019

¹¹ Ibid

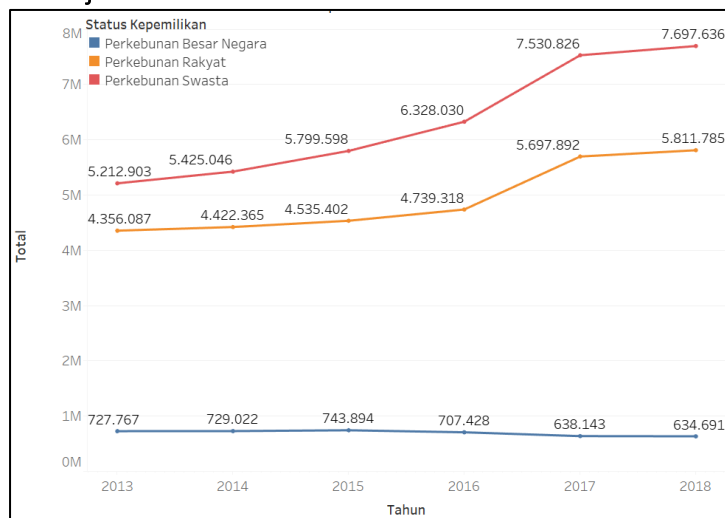
¹² Jambi dalam Angka. Badan Pusat Statistik Jambi. 2019

Situasi ini bisa memberikan sebuah gambaran bahwa kesejahteraan masyarakat perlu digantungkan pada keberagaman komoditas dan keseimbangan tingkat produksi antar komoditas perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat. Kebijakan yang disusun perlu melihat signifikansi dari komoditas lain yang terdapat pada suatu daerah, menyeimbangkan perhatian yang diberikan oleh pengambil kebijakan terhadap komoditas lain. Sehingga peningkatan produktivitas dari komoditas lain pun dapat di upayakan secara maksimal. Analisis ini dapat memberikan sebuah indikasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam meletakkan prioritas pembangunan perkebunan di daerahnya.

URGENSI PEMBENAHAN TATA KELOLA DEMI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SAWIT

Meski menjadi produsen CPO terbesar di dunia, ditambah dengan laju luas kebun yang terbilang besar, nyatanya produktivitas sawit Indonesia masih jauh dari harapan. Sampai dengan 2018 luas perkebunan sawit nasional telah mencapai 14,3 juta hektare (ha), dari yang sebelumnya hanya seluas 133,2 ribu ha pada 1970.¹³ Spesifik pada periode 2013-2018 (tabel 1), rata-rata laju pertumbuhan kebun sawit nasional tercatat naik 2,7% setiap tahunnya. Secara akumulatif, perkebunan swasta menduduki peringkat pertama dengan rata-rata laju pertumbuhan luas 6,14%/tahun, diikuti perkebunan rakyat dengan luas 4,51 %/tahun, kemudian perkebunan negara yang memiliki tren penurunan -2,3% dalam periode tersebut. Masifnya perkembangan luas perkebunan sawit salah satunya didorong oleh tekanan permintaan pasar global dan kebutuhan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁴

Grafik 1. Laju Pertumbuhan Area Tanam Sawit Nasional Periode 2013-2018



Sumber: Data Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Sawit, Kementerian Pertanian 2019 (diolah)

Terkait produktivitas, menarik untuk sedikit menilik ke belakang terkait target nasional yang telah disepakati pada perayaan 100 tahun Industri Sawit Indonesia di Medan 2011 silam. Pada kesempatan tersebut, pemerintah mencanangkan visi 35-26 atau produktivitas sebesar 9 ton CPO/ha. Visi ini menjadi gerakan bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) untuk mewujudkan target tersebut setidaknya di tahun 2020.¹⁵ Namun demikian, nampaknya target ini amat sulit tergapai, pasalnya produktivitas pada periode 2013-2018 (tabel 2) masih di kisaran angka 3,6 ton/ha. Jika ditilik dari kepemilikan, perkebunan swasta memiliki produktivitas 3,94 ton/ha/tahun; perkebunan besar negara memiliki produktivitas 3,60 ton/ha/tahun dan terakhir perkebunan rakyat dengan rata-rata 3,16 ton/ha per tahun. Artinya dengan target produktivitas 9 ton CPO/ha

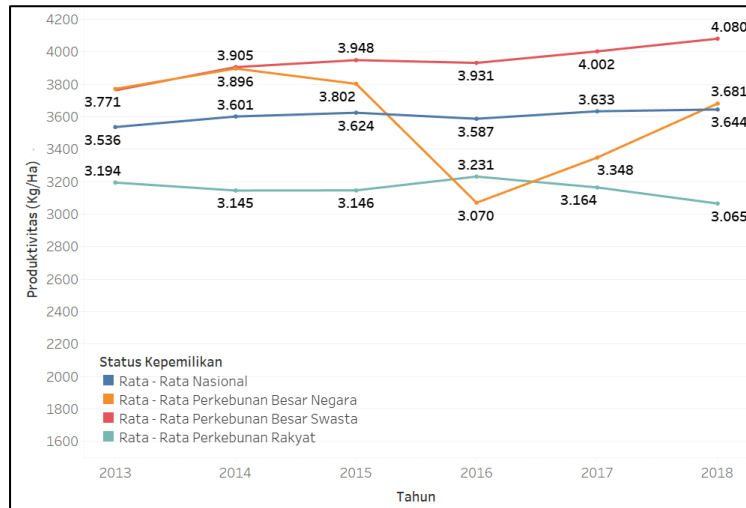
¹³ Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019: Kelapa Sawit. 2018. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Hlm 3

¹⁴ Yulian Eka dkk., 2018. Dilema Nafkah Rumah Tangga Pedesaan Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur. Bogor. Center for International Forestry Research (CIFOR). Hlm.1

¹⁵ Saragih Bungaran. 2017. Produktivitas Sumber Pertumbuhan Minyak Sawit yang Berkelanjutan. Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Bogor. Hlm.3

yang telah ditetapkan tersebut, produktivitas sawit nasional saat ini harus dinaikkan sekitar 3 kali lipat dari rata-rata produktivitas saat ini.

Grafik 2. Rata-Rata Produktivitas Sawit Nasional Periode 2013-2018



Sumber: Data Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Sawit, Kementerian Pertanian 2019 (diolah)

Antara Produktivitas dan Tata Kelola

Grafik 1 dan 2 menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada lahan perkebunan swasta dan rakyat, namun secara produktivitas, perkebunan rakyat jauh tertinggal dari perkebunan swasta. Laju peningkatan lahan perkebunan rakyat tidak dibarengi dengan nilai rata-rata produktivitas setiap tahunnya yang menunjukkan *status quo* dari tahun ke tahun. Seperti peningkatan luas lahan perkebunan swasta dan rakyat signifikan terjadi pada tahun 2016 ke 2017. Pada tahun tersebut perkebunan swasta mengalami peningkatan lahan seluas 1,2 juta ha dan perkebunan rakyat pun hampir menyamainya dengan 958 ribu ha. Akan tetapi peningkatan luas lahan perkebunan rakyat tersebut tidak sebanding dengan rata-rata produktivitas yang hanya berkutat di angka 3,6 ton/ha/tahun, tertinggal dari perkebunan swasta yang menyentuh angka 4 ton/ha/tahun. Sementara itu dengan laju penambahan luas yang cenderung menurun, perkebunan negara menunjukkan tren produktivitas yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Produktivitas perkebunan negara hampir menyamai perkebunan swasta pada 2014 dengan nilai 3,8 ton/ha/tahun, namun terjadi penurunan produktivitas yang signifikan pada 2016 dengan nilai 3 ton/ha/tahun.

Status Quo yang terjadi dalam peningkatan lahan dan produktivitas perkebunan rakyat salah satunya disebabkan oleh anggapan dari pekebun kecil sawit yang memandang ekstensifikasi sebagai cara utama meningkatkan produktivitas. RRRRC UI pada tahun 2016 telah melakukan studi yang melibatkan 1.350 pekebun di 96 desa yang tersebar di lima kabupaten di Riau dan Sumatera Selatan, hasilnya didapatkan sebanyak 69% pekebun kecil sawit tidak bersedia menerima kompensasi untuk tidak membuka lahan baru, termasuk membuka hutan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktek perkebunan sawit rakyat lebih cenderung pada pembukaan lahan baru dibandingkan peningkatan produktivitas. Berkaca pada 2017, luas lahan sawit milik petani perkebunan rakyat secara keseluruhan sebesar 4,7 juta hektar dengan proporsi lahan milik petani plasma sebesar 1 juta hektar dan milik petani swadaya mencapai 3,7 juta hektar.¹⁶

Hal ini lah yang ternyata menimbulkan masalah baru, pasalnya pertumbuhan petani sawit swadaya tersebut terjadi tanpa adanya dukungan dari pemerintah. Hasilnya, petani swadaya susah untuk mengakses bibit yang berkualitas tinggi dan kurangnya pengetahuan akan manajemen dan pengelolaan sawit yang tepat. Pada akhirnya, produktivitas sawit dari petani swadaya pun menjadi jauh tidak produktif dibandingkan dengan perkebunan swasta.¹⁷ Lebih dari itu, permasalahan yang diuraikan di atas berhulu pada tumpang tindihnya permasalahan pendokumentasian lahan perkebunan rakyat yang diragukan legalitasnya. Permasalahan legalitas tersebut berimbas pada terbatasnya akses petani swadaya dalam aspek pemodal dan kualitas bibit yang bersertifikat.¹⁸

¹⁶ Ini Penyebab Produktivitas Sawit Petani Rendah <https://ekonomi.bisnis.com/read/20171102/99/705564/ini-penyebab-produktivitas-sawit-petani-rendah-diakses-tanggal-4/12/19> pukul 14.35

¹⁷ Idsert Jelsma, G.C. Schoneveld, Annelies Zoomers, A.C.M. van Westen, Unpacking Indonesia's independent oil palm smallholders: An actor-disaggregated approach to identifying environmental and social performance challenges, Land Use Policy, Volume 69:2017, Pages 281-297

¹⁸ Idsert Jelsma, G.C. Schoneveld, Annelies Zoomers, A.C.M. van Westen, Unpacking Indonesia's independent oil palm smallholders: An actor-disaggregated approach to identifying environmental and social performance challenges, Land Use Policy, Volume 69:2017, Pages 281-297,

Hal menarik yang juga patut dicermati adalah fluktuasi produktivitas yang dialami perkebunan negara dengan kondisi tren penurunan lahan yang dimiliki. Tahun 2016 menjadi periode terburuk perusahaan negara terkait produktivitas sawit. Merujuk telaah yang dilakukan Center of Energy and Resources Indonesia pada 2017, kinerja Holding perkebunan pada berbagai indikator, baik operasional maupun finansial, relatif menurun dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini akibat dari berbagai faktor teknis operasional pengelolaan kebun dan faktor lain yang berpengaruh. Dari sisi finansial, di tahun tersebut PTPN memiliki hutang sebesar Rp 60,2 Trilyun, yang merupakan hutang terbesar sepanjang sejarah berdirinya perusahaan plat merah tersebut. Permasalahan lain yang mempengaruhi produktivitas sawit perusahaan negara di tahun tersebut adalah kasus permasalahan PTPN II yang terkesan berlarut-larut; harga pokok penjualan rata-rata yang 35% lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor; biaya tenaga kerja menyumbang hampir 60% beban produksi dan pemupukan pada komoditas sawit belum sesuai dengan baku teknis dan rekomendasi pusat penelitian. Lebih dari itu, selain kondisi iklim di tahun 2016 yang berimbas pada produktivitas, tantangan penurunan produktivitas sawit milik PTPN disebabkan oleh rendahnya semangat dan etos kerja serta motivasi karyawan yang berdampak langsung pada rendahnya produktivitas karyawan.¹⁹

Kesimpulan

1. Fokus untuk menyeimbangkan antar jenis komoditas di suatu wilayah perlu menjadi prioritas utama pembangunan perkebunan. Sehingga antara kelapa sawit dengan komoditas perkebunan lainnya dapat menjadi kontributor yang memiliki pijakan kuat bagi ekonomi;
2. Diversifikasi komoditas perlu untuk dilakukan melalui pencacahan data yang lebih detil lagi pada tingkat Provinsi dan Kabupaten. Data Nasional dapat dijadikan sebagai indikasi awal dalam proses perencanaan;
3. Dinamika pasar kelapa sawit yang masih terus bergejolak hingga saat ini perlu menjadi sebuah pengingat bahwa terdapat urgensi untuk memikirkan diversifikasi komoditas;
4. Perluasan wilayah tanam kelapa sawit tidak selalu berbanding lurus dengan produktivitas yang meningkat. Tingginya luasan wilayah tanam yang saat ini, produktivitasnya masih dibawah target nasional yang telah disepakati bersama. Ini menunjukkan ada tantangan produktivitas yang perlu untuk juga menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan;
5. Kecenderungan masyarakat untuk memperluas wilayah tanam disebabkan oleh keterdesakan rendahnya produktivitas akibat praktek berkebun yang belum sesuai dengan kaidah perkebunan yang baik. Ini menjadi sebuah agenda bagi Pemerintah untuk dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pupuk, pembinaan, dan bibit yang sesuai kaidah perkebunan yang baik.
6. Perusahaan negara kerap dipandang sebelah mata karena luasannya yang jauh diatas rata-rata nasional, namun dari sisi produktivitas terdapat dinamika yang cukup mengejutkan. Dengan luasan yang cenderung stabil, produktivitasnya pada tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan.
7. Momentum moratorium perlu untuk menjadi sebuah kesempatan untuk menyeimbangkan neraca komoditas perkebunan di Indonesia, sehingga tidak hanya bergantung pada satu komoditas saja. Ini akan menjadi kunci untuk kebangkitan ekonomi melalui sektor perkebunan di Indonesia.

¹⁹ Usman Yuri. 2017. Center of Energy and Resources. Diakses melalui <https://jakartasatu.com/2017/02/27/pt-perkebunan-nusantara-terjebak-bangkrut-menteri-rini-harus-tanggungjawab/> diakses pada 9/12/19 pukul 15:06